

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PPh BADAN
DI KPP SURAKARTA PERIODE 2001–2004**



**Tugas Akhir
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana Ahli Madya
Program D3 Perpajakan**

**Di Susun Oleh :
Wahyu Harjanti
NIM F 3402059**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2005**

ABSTRAKSI

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PPh BADAN DI KPP SURAKARTA PERIODE 2001–2004

Wahyu Harjanti
F.3402059

Sesuai dengan komitmen Pemerintah di dalam pembiayaan negara, di mana setelah sektor migas sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber penerimaan negara dan guna melepaskan dari ketergantungan terhadap hutang luar negeri, maka penerimaan pajak dijadikan sebagai tulang punggung pemerintah di dalam membiayai kegiatannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan diberi wewenang dan tugas untuk mengelola penerimaan pajak tersebut. Seperti yang terlihat pada struktur RAPBN setiap tahunnya rencana atau target penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, sehingga semua pihak terutama DJP dituntut bekerja keras untuk dapat merealisasikannya, termasuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta sebagai instansi vertikal DJP di daerah.

Adapun Seksi PPh Badan yang merupakan salah satu unit yang berada dalam struktur organisasi KPP Surakarta, mempunyai beban tugas untuk mengamankan target penerimaan pajak terutama dari jenis penerimaan PPh Badan. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PPh Badan tersebut, antara lain dengan memperbandingkan antara realisasi dengan target penerimaannya, karena ini pun merupakan salah satu parameter yang digunakan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja.

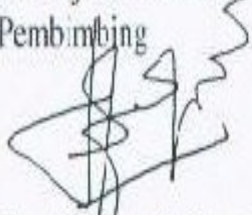
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, diketahui bahwa realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta dari tahun anggaran 2001–2004 mampu melampaui rencana yang telah ditetapkan. Persentase efektivitas penerimaan PPh Badan periode 2001–2004 rata-rata di atas 100%, yaitu sebesar 102,15%. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 159,07%. Dengan demikian penerimaan PPh Badan selama periode 2001–2004 dapat dikatakan efektif.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disetujui dan diterima oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Perpajakan.

Surakarta, Agustus 2005

Disetujui dan diterima oleh :
Pembimbing



Drs. Hanang Triatmoko, Ak.
NIP. 131 997 462

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan

Surakarta, Agustus 2005

Tim Penguji Tugas Akhir :

1. Drs. Santosa Trihananto, MSi, Ak.
Dosen Penguji
2. Drs. Hanung Triatmoko, MSi, Ak.
Dosen Pembimbing

()
()

MOTTO

“Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan.”

(QS. Al Mujaadilah : 11).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang sangat mencintai dan menyayangi diriku.
2. Kakak-kakakku tersayang yang ikut mendo'akan demi tercapainya apa yang kucita-citakan.
3. Teman-teman seperjuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas akhir yang berjudul “EFEKTIVITAS PENERIMAAN PPh BADAN DI KPP SURAKARTA PERIODE 2001–2004” ini ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Ahli Madya Program D3 Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis telah bekerja keras dalam mencari bahan penulisannya disertai dengan data yang diperlukan. Namun sehubungan dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis masih merasa perlu sekali adanya bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, di sini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu orang tua yang tercinta.
2. Ibu Dra. Salamah Wahyuni, SU. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, MSi. Ak. selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Dosen Pembimbing, Drs. Hanung Triatmoko, Ak.
5. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, Rubijanto, S.H. beserta seluruh stafnya.

6. Bapak/Ibu Dosen beserta staf Administrasi pada Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
7. Saudara-saudaraku yang telah membantu penulis baik moril maupun materiil,
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada tingkat program diploma ini.
8. Teman-teman yang telah membantu dalam memberi semangat/spirit kepada
penulis.

Mudah-mudahan segala amal perbuatan kebajikan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu,
dan rekan-rekan semua diterima di sisi Allah SWT sebagai amal yang mulia serta
mendapat balasan yang selayak.

Sesungguhnya Tugas Akhir ini telah penulis susun dengan sebaik-baiknya,
namun penulis menyadari bahwa dalam penyajian dan pengkajian tugas akhir ini
tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan atau kelemahannya.
Oleh sebab itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis
sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi
kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan Tugas Akhir yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi
para pembaca, dan kita semua selalu mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.
Amien.

Surakarta, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAKSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Gambaran Umum | |
| 1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Surakarta..... | 1 |
| 2. Struktur dan <i>Job Discription</i> Organisasi KPP Surakarta | 4 |
| 3. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta | 11 |
| 4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta..... | 12 |
| 5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak | 13 |
| B. Latar Belakang Masalah | 15 |
| C. Pembatasan Masalah | 17 |
| D. Perumusan Masalah | 17 |

| | |
|---|----|
| E. Tujuan Penelitian | 18 |
| F. Manfaat Penelitian | 18 |
| G. Metodologi Penelitian | 19 |
| BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN | |
| A. Landasan Teori | |
| 1. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan | 22 |
| a. Subjek Pajak | 22 |
| b. Objek Pajak | 25 |
| c. Penghasilan Kena Pajak (PKP) | 27 |
| d. Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Yang terutang | 28 |
| 2. Pelunasan Pajak Penghasilan | 29 |
| B. Analisis dan Pembahasan..... | 30 |
| 1. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak | 30 |
| a. Rencana Penerimaan Pajak | 30 |
| b. Realisasi Penerimaan Pajak | 31 |
| 2. Evaluasi Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Badan KPP | |
| Surakarta Periode 2001–2004 | 32 |
| 3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh KPP Surakarta | 39 |
| 4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Fiskus Dalam Mengatasi Kendala- | |
| Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak | 40 |
| 5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Fiskus Dalam Meningkatkan | |
| Penerimaan PPh Badan | 41 |

BAB III TEMUAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kelebihan | 43 |
| B. Kekurangan | 44 |

BAB IV REKOMENDASI

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 45 |
| B. Saran | 46 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

- II.1 Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Periode 2001-2004
- II.2 Persentase Kenaikan (Penurunan) Penerimaan PPh Badan KPP Surakarta Periode 2001-2004
- II.3 Laporan Efektivitas Realisasi Penerimaan PPh Badan terhadap Rencana Penerimaan PPh Badan KPP Surakarta Periode 2001-2004

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan
2. Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari KPP Surakarta
3. Struktur Organisasi KPP Surakarta
4. Daftar Rencana Penerimaan Pajak KPP Surakarta Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005
5. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak (Laporan Penerimaan Pajak) KPP Surakarta Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 519/KMK.01/2003 tanggal 02 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah II. Berikut ini secara singkat dapat diuraikan gambaran umum tentang Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Surakarta

Sejak jaman kolonial Belanda, kantor yang mengelola pajak seperti yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Surakarta sudah ada, dengan berbagai perkembangan nama maupun jenis pajak yang dikelola secara ringkas sejarah berdirinya adalah sebagai berikut.

Sebelum tahun 1966, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta berbentuk Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk.I) Surakarta dibawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta, sebagaimana KDL Tk.I Klaten.

Pada Tahun 1966, dengan pertimbangan semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak dan semakin besarnya jumlah penerimaan pajak, maka KDL Tk.I Surakarta ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta (KIK Surakarta) yang membawahi diantaranya KDL Tk.I Klaten. Sehingga KDL

Tk.I Surakarta dan Klaten menjadi lepas dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta.

Pada akhir tahun 1966, semua Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) di seluruh Indonesia diubah atau diganti namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP), termasuk KIK Surakarta diubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surakarta (KIP Surakarta) yang bertipe B2, dengan wilayah kerja se-eks Karesidenan Surakarta.

Pada tanggal 1 April 1989, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, KIP Surakarta dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe B, dengan wilayah kerjanya :
 - a. Kotamadya Surakarta – Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa) Surakarta Tipe A.
 - b. Kabupaten Sragen – Kapenpa Sragen Tipe B.
 - c. Kabupaten Karanganyar – Kapenpa Karanganyar Tipe B.
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Klaten Tipe B, dengan wilayah kerjanya :
 - a. Kota Administratif Klaten – Kapenpa Klaten Tipe A.
 - b. Kabupaten Boyolali – Kapenpa Boyolali Tipe B.
 - c. Kabupaten Sukoharjo – Kapenpa Sukoharjo Tipe B.
 - d. Kabupaten Wonogiri – Kapenpa Wonogiri Tipe B.

- 3) Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UPP) Surakarta Tipe B, dengan wilayah kerjanya se-eks Karesidenan Surakarta (wilayah kerja eks Kantor Inspeksi Pajak Surakarta).

Teknis pelaksanaan pemecahan tersebut dengan catatan :

- Realisasi pemecahan ke UPP Surakarta efektif per tanggal 2 Oktober 1989 dengan adanya Nota Dinas Pengalihan Tugas Nomor : ND-23/WPJ.08/KP.14/1989 tanggal 29 September 1989 yang mengalih tugaskan sejumlah 11 (sebelas) pegawai KIP Surakarta ke UPP Surakarta.
- Realisasi pemecahan ke KPP Klaten efektif per tanggal 1 Desember 1989 dengan adanya Nota Dinas Pengalihan Tugas Nomor : ND-28/WPJ.08/KP.14/1989 tanggal 28 Nopember 1989 yang mengalih tugaskan sejumlah 66 (enam puluh enam) pegawai KIP Surakarta ke KPP Klaten.
- Pegawai eks KIP Surakarta yang masih tersisa menjadi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, keadaan per 1 Desember 1989 jumlah pegawai yang masih tersisa sebanyak 114 orang yang berstatus pegawai eselon V dan petugas.

Sejak tanggal 29 Maret 1994, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta menjadi Tipe A sampai sekarang yang memiliki wilayah kerja meliputi :

- a. Kotamadya Surakarta – Kapenpa Surakarta yang berkedudukan di Boyolali.
- b. Kabupaten Karanganyar.

- c. Kabupaten Boyolali.
- d. Kabupaten Sragen – Kapenpa Sragen yang berkedudukan di Sragen.

2. Struktur dan *Job Discription* Organisasi KPP Surakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 535/KMK.01/ 2001 struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Umum (Subag umum)

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, laporan, keuangan, dan rumah tangga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

1. Pengurusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
2. Pengurusan keuangan.
3. Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.

Susunan Organisasi Sub Bagian Umum terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Koordinator Pelaksana Keuangan.
3. Koordinator Pelaksana Rumah Tangga.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi serta pembuatan monografi pajak, penggalan potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi PDI mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data.
2. Penyajian informasi.
3. Penggalian potensi pajak.
4. Ekstensifikasi wajib pajak.

Susunan Organisasi Seksi PDI terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi I.
2. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi II.
3. Koordinator Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi III.

c. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha wajib pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta penerbitan surat ketetapan pajak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai fungsi:

1. Pendaftaran wajib pajak.
2. Penatausahaan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan.
3. Pengurusan kearsipan berkas Wajib Pajak.
4. Penyiapan bahan penerbitan surat ketetapan pajak.

Susunan Organisasi Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari tiga Koordinator Pelaksana yaitu :

1. Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu.
2. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak.
3. Koordinator Pelaksana Ketetapan dan Arsip WP.

d. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3. Penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
4. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.
5. Pengurusan fiskal luar negeri.

Susunan Organisasi Seksi PPh OP terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi I.
2. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi II.

e. Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan

menyusun laporan pembayaran masa, serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan.
2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.
3. Penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan.
4. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

Susunan Organisasi Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Badan I.
2. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Badan II.

f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pot/Put PPh)

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
3. Penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
4. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

Susunan Organisasi Seksi Pot/Put PPh terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I.
2. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II.

g. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN dan PTLL)

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan urusan konfirmasi Faktur Pajak, serta melakukan urusan

verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
3. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Konfirmasi Faktur Pajak.
5. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

Susunan Organisasi Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu:

1. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Industri.
2. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan.

3. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

h. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan wajib pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Penagihan mempunyai fungsi:

1. Penatausahaan piutang pajak.
2. Penyiapan Surat Tegoran dan pengurusan penagihan paksa.

Susunan Organisasi Seksi Penagihan terdiri dari :

1. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak.
2. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif.

i. Seksi Penerimaan dan Keberatan (Pen-Keb)

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan menyelesaikan keberatan serta perselisihan perpajakan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai fungsi :

1. Rekonsiliasi dan pengolahan Surat Setoran Pajak.
2. Penatausahaan penerimaan pajak.
3. Pengurusan restitusi.
4. Penyelesaian keberatan pajak.
5. Penyelesaian perselisihan perpajakan.

Susunan Organisasi Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari tiga koordinator pelaksana, yaitu:

1. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan Restitusi Pajak dan Rekonsiliasi.
2. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Penghasilan.
3. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

3. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta berada di lokasi yang strategis dan mudah untuk ditemukan. Hal ini berkaitan dengan perannya untuk selalu memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak secara pasti. Lokasi atau tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Surakarta beralamatkan di Jalan K.H. Agus Salim No. 1 Surakarta.

4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta

Kantor Pelayanan Pajak Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak;
- Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya;
- Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
- Penerbitan surat ketetapan pajak;
- Pembetulan surat ketetapan pajak;
- Pengurangan sanksi pajak;
- Penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
- Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

a. Visi

Direktorat Jenderal Pajak bertekad menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Adapun ciri-cirinya antara lain adalah:

1. Aparat berintegritas tinggi dan profesional.
2. Berkinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan negara-negara maju.
3. Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh.
4. Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan internasional.
5. Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi.

b. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, dengan batasan-batasan antara lain:

- Tingkat *Tax Ratio*, *Coverage ratio* dan *Compliance Ratio* yang tinggi;
- Pajak mampu berperan utama membiayai defisit APBN;
- Kebijaksanaan perpajakan netral dan *non distortion*;
- Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, dan politik;

- *Cost of Collection* yang rendah.

Nilai acuan (*reference value*) yang dipakai dalam rangka menjalankan misi Direktorat Jenderal Pajak di atas adalah :

- Profesionalisme (integritas, disiplin, dan kompetensi);
- Transparansi;
- Akuntabilitas;
- Pelayanan publik prima;
- Agen pemberdayaan dan Pemberadaban Masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai kelanjutan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia sedang giatnya mengadakan pembangunan. Pembangunan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu dilakukan secara bertahap, yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) dan selanjutnya dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN terdiri dari Pos Pendapatan Negara dan Hibah, Pos Belanja Negara, Pos Surplus/Defisit Anggaran, dan Pos Pembiayaan.

Pos Pendapatan Negara dalam APBN, salah satunya bersumber dari Penerimaan Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi di bawah naungan Departemen Keuangan mempunyai tugas menghimpun penerimaan

perpajakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya, setelah reformasi perpajakan (*tax reform*) 1983 terjadi perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Selain mengubah sistem dan mekanisme pemungutan pajak juga mengubah cara pandang pengenaan pajak terhadap masyarakat, yaitu :

- Pemungutan pajak merupakan perwujudan peran serta dan pengabdian masyarakat secara langsung terhadap pembangunan nasional.
- Masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang (*self assessment*).

Bila semula dengan sistem *official assessment*, besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar masyarakat dihitung oleh kantor pajak. Dengan sistem ini, banyak yang beranggapan dan memberikan kesan bahwa penetapan pajak dilakukan sepihak, sehingga pajak dianggap sebagai momok, karena setiap saat dianggap bisa muncul ketetapan pajak yang mungkin tidak diduga sebelumnya.

Dengan sistem *self assesment*, masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank persepsi atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Diantaranya, PPh Pasal 25 Badan yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tiap bulan, dan PPh Pasal 29 Badan tiap tahun. Dengan demikian, masyarakat Wajib Pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan dengan semua peraturan

pelaksanaannya. Dan KPP lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina, dan penyedia fasilitas.

KPP hanya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan, apakah masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan, bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bila ada yang belum atau tidak sesuai, akan dihitung kembali besarnya pajak yang terutang, dan diterbitkan surat ketetapan pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh seberapa efektifnya pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan untuk periode tahun 2001-2004 ke dalam Tugas Akhir yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERIMAAN PPh BADAN DI KPP SURAKARTA PERIODE 2001-2004"**.

C. Pembatasan Masalah

Terdapat berbagai cara untuk mengevaluasi penerimaan PPh badan. Namun dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah pada efektif tidaknya pemungutan PPh Badan terhadap penerimaan pajak, yaitu : dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi sesungguhnya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah realisasi pemungutan PPh Badan terhadap rencana penerimaan pajak di KPP Surakarta untuk periode 2001-2004, sudah efektif?
2. Kendala- kendala yang dihadapi KPP dalam pemungutan pajak?
3. Upaya-upaya yang dilakukan KPP dalam meningkatkan penerimaan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Badan di KPP Surakarta periode 2001-2004.
2. Mengetahui berbagai upaya yang dilakukan fiskus dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak.
3. Mengetahui berbagai upaya yang dilakukan fiskus dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan.

F. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PPh Badan.
2. Memberikan sumbang saran terbaik dalam mengambil langkah-langkah upaya peningkatan penerimaan PPh Badan.
3. Menambah wawasan bagi penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah.

4. Sebagai referensi yang memberikan informasi dalam melakukan studi banding terhadap permasalahan yang sama dan mengembangkan penelitian yang sejenis di masa mendatang.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1984: 6).

Dalam suatu penelitian untuk memperoleh suatu hasil yang valid dan reabel, maka diperlukan adanya metodologi, dimana metodologi mempunyai fungsi untuk memberikan patokan atau pedoman dalam menganalisis, mempelajari dan memahami keadaan yang dihadapi peneliti dalam suatu penelitian (Soekanto, 1986: 43).

1. Jenis penelitian

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan suatu profil atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan suatu fenomena yang diteliti dari perspektif individual, organisasi, industri dan perspektif lainnya (Hermawan, 2004 : 34). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, melalui:

- Identifikasi masalah yang timbul;
- Wawancara dan pengamatan langsung;
- Analisis data dan informasi.

2. Jenis data

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi, keterangan, dan sikap / perilaku atau hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data sekunder

Yaitu data yang menunjang dan mendukung data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literature, makalah, jurnal, dan sumber tertulis lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yang berwenang di KPP. Dan dari sumber data di KPP Surakarta berupa Laporan Penerimaan Pajak KPP Surakarta periode 2001-2004.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan perpajakan, literature, makalah, jurnal, dan sumber tertulis lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data primer, maka digunakan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong 2001: 135).

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta memahami buku-buku, artikel, perundang-undangan serta karangan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Analisis data

Setelah data dikumpulkan dari tempat penelitian maka tahap selanjutnya adalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soekanto, 1984 : 250) berupa gambaran umum instansi KPP Surakarta.
- Analisis data kuantitatif berupa data rencana dan realisasi penerimaan PPh Badan Tahun Anggaran 2001-2004.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Subjek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak (ahli waris). Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan

usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Ditinjau dari tempat kedudukan dan atau tempat tinggal, Subjek Pajak dapat dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- 3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :

- 1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak yang dimaksud tersebut, berdasarkan Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Demikian halnya dengan Subjek Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta telah mendapatkan NPWP.

b. Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh;
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) laba usaha;
- 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- 5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) royalti;
- 9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

- 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) premi asuransi;
- 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Dengan demikian, pengertian penghasilan dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu :

- 1) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- 2) penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, baik yang berupa harga gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, sewa, keuntungan, penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok di atas, seperti keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, hadiah undian dan sebagainya.

c. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak berdasarkan undang-undang PPh.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak. Untuk Wajib Pajak Badan, besarnya PKP sama dengan penghasilan netonya (laba usaha), yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau perorangan, besarnya PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun demikian, khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau perorangan yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Meskipun diperbolehkan menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Badan yaitu :

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan Neto (Laba Usaha)} \\ &= \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya} \end{aligned}$$

d. Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Yang Terutang

Dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

$$\text{Besarnya PPh} = \text{Tarif Pajak} \times \text{PKP}$$

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No.17 Tahun 2000, Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Tarif Pajak Penghasilan WP Badan

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|----------------------------|
| sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 10% (sepuluh persen) |
| di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) | 15% (lima belas persen) |
| di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) | 30% (tiga puluh persen) |

2. Pelunasan Pajak Penghasilan

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24), serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri (PPh Pasal 25), yang dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pelunasan pajak tahun berjalan tersebut merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Pada akhir tahun, Wajib Pajak mengadakan perhitungan kembali untuk mengetahui jumlah PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29), yaitu dengan menghitung sendiri jumlah PPh terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.

B. Analisis Dan Pembahasan

1. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak

a. Rencana Penerimaan Pajak

Setelah sektor migas tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber penerimaan negara, sektor nonmigas berupa penerimaan pajak merupakan suatu alternatif yang cukup potensial. Hal ini terlihat dengan jelas pada struktur RAPBN yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Struktur RAPBN yang menempatkan posisi pajak seperti itu, menunjukkan bahwa pajak tidak lagi bersifat komplementer, tetapi lebih merupakan penopang utama RAPBN. Rencana penerimaan pajak atau target pajak yang selalu meningkat menuntut kerja keras dari seluruh pihak, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pihak yang diberi wewenang untuk mengelola penerimaan pajak. Demikian pula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selaku kantor instansi vertikal DJP di daerah, karena target penerimaan yang dibebankan pada masing-masing KPP tentunya mengalami kenaikan pula setiap tahunnya, termasuk KPP Surakarta.

Hal ini dikarenakan rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam RAPBN tersebut oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada DJP untuk direalisasikan. Kemudian oleh Dirjen Pajak, rencana atau target penerimaan tersebut dibagi merata ke setiap Kanwil DJP. Selanjutnya setiap Kanwil akan membagi target penerimaan pajak itu ke setiap KPP yang berada dalam wilayah wewenangnya. Dan pada akhirnya, setiap KPP akan membagi tugas merealisasikan target penerimaan tersebut per jenis penerimaan yang ada tiap Seksi yang terkait. Dalam pembagian rencana atau target penerimaan pajak tersebut, selalu mempertimbangkan perkembangan penerimaan pajak masing-masing kantor yang tertuang dalam Laporan Penerimaan Pajak (LPP) dan disesuaikan dengan potensi penerimaan yang masih ada pada masing-masing kantor (Kanwil/KPP).

b. Realisasi Penerimaan Pajak

Salah satu parameter keberhasilan kinerja Kantor Pelayanan Pajak adalah seberapa besar tingkat penerimaan pajak yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana. Penerimaan pajak merupakan bukti nyata keberhasilan suatu KPP dalam memenuhi target yang telah dibebankan kepadanya. Keberhasilan penerimaan pajak juga merupakan bukti semakin baik kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya membayar pajak. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah adalah salah satu syarat keberhasilan pengumpulan pajak dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategi dalam mengamankan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Demikian halnya dengan Seksi PPh Badan yang merupakan salah satu unit yang berada dalam struktur organisasi KPP Surakarta, mempunyai beban tugas untuk mengamankan target penerimaan pajak dari jenis penerimaan PPh Badan.

2. Evaluasi Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta Periode 2001–2004

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PPh Badan periode 2001–2004, dalam pelaksanaan penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis kuantitatif (menggunakan angka atau rumus), yaitu memperbandingkan antara realisasi dengan target penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta.

Berikut ini terdapat beberapa definisi mengenai efektivitas, yaitu :

- a. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2003 : 7).
- b. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki (Gie, 1997 : 108).
- c. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang (Devas, 1996 : 144).
- d. Efektivitas adalah tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan atau dapat pula berarti tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal (Gitosudarmo dan Mulyono, 1996:7).

Dari uraian tersebut di atas, maka untuk menghitung efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil aktual dengan tujuan yang direncanakan dan standar (Gitosudarmo dan Mulyono, 1996). Sehingga efektivitas penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta periode 2001–2004 dapat dirumuskan sebagai berikut :

| | | |
|---------------|--------------------------------|--------|
| Efektivitas = | Realisasi Penerimaan PPh Badan | X 100% |
| | Rencana Penerimaan PPh Badan | |

Tabel II.1

**Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Badan
Kantor Pelayanan Pajak Surakarta
Periode 2001 – 2004**

| Tahun Anggaran | Rencana Penerimaan PPh Badan | Realisasi Penerimaan PPh Badan |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2001 | 22.361.000.000 | 18.657.473.677 |
| 2002 | 25.766.980.000 | 13.784.198.297 |
| 2003 | 20.394.400.000 | 20.883.683.102 |
| 2004 | 29.290.000.000 | 46.592.923.720 |
| 2005 | 32.511.890.000 | -- |

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Surakarta, data diolah

Tabel II.1 di atas memperlihatkan data realisasi PPh Badan terhadap rencana penerimaannya selama empat tahun terakhir. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2001 realisasi penerimaan PPh Badan sebesar Rp18.657.473.677,00 dan pada tahun 2002 penerimaan turun menjadi Rp13.784.198.297,00 atau sebesar 26,12% dari realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2001. Hal ini disebabkan antara lain : banyak Wajib Pajak yang mengajukan restitusi PPh, karena kelebihan pembayaran PPh yang terjadi pada tahun 2001 baru bisa dicairkan di tahun 2002. Jumlah restitusi PPh Badan yang telah dicairkan selama tahun 2002 hingga mencapai Rp4.554.482.409,00. Sehubungan dengan banyak Wajib Pajak mengalami lebih bayar PPh pada tahun 2001, mengakibatkan banyak pula Wajib Pajak yang mengalami penurunan pembayaran angsuran masa PPh Pasal 25-nya. Sebab besarnya angsuran masa PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan pada laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun lalu. Disamping itu, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai sarana

penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat membayar dan atau melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25, mengalami hambatan karena adanya perbaikan program SIP (Sistem Informasi Perpajakan).

Apabila dibandingkan dengan rencana penerimaannya, realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta pada tahun 2001 dan 2002 belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh Kanwil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2001 terjadi perubahan ketentuan pelaksanaan Undang-undang PPh yaitu dengan diberlakukannya UU No.17 tahun 2000, sehingga banyak Wajib Pajak Badan yang mengalami penurunan pembayaran Pajak Penghasilannya karena terjadi perubahan penerapan tarif pajak (lapisan penghasilan kena pajak) seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

Tarif Pajak yang Lama

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|----------------------------|
| sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) | 10% (sepuluh persen) |
| di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 15% (lima belas persen) |
| di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 30% (tiga puluh persen) |

Sedangkan pada tahun 2002, rencana penerimaan PPh Badan mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian hingga mencapai jumlah sebesar Rp25.766.980.000,00. Jumlah ini dirasakan masih terlalu besar dan tidak realistis bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh Badan tahun

2001. Sehingga realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2002 pun akhirnya mengalami defisit sebesar Rp11.982.781.703,00.

Pada tahun 2003 realisasi penerimaan PPh Badan mengalami kenaikan, bahkan mampu melampaui target penerimaan yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp20.883.683.102,00 dari target penerimaan sebesar Rp20.394.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2002, penerimaan PPh Badan tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar Rp7.099.484.805,00 atau sebesar 51,50%.

Pada tahun 2004 realisasi penerimaan PPh Badan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp46.592.923.720,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2003, realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar Rp25.709.240.618,00 atau sebesar 123,11%. Hal ini disebabkan adanya tambahan setoran PPh Pasal 25 Badan dari KPP lain sebesar Rp17,9 milyar dan terdapat pelunasan tunggakan utang pajak dari Wajib Pajak sebesar ± Rp4 milyar. Dengan demikian, selama tahun 2004 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di wilayah kerja KPP Surakarta sudah membaik, karena PPh Badan dikenakan atas laba usaha dari Wajib Pajak Badan yang bersangkutan. Semakin besar laba usaha yang diperoleh berarti usaha Wajib Pajak mengalami pertumbuhan omset penjualan yang besar pula. Dan sudah tentu, semakin besar laba usaha yang diperoleh Wajib Pajak Badan berarti semakin besar pula PPh Badan yang harus dibayarkan.

Besarnya kenaikan (penurunan) realisasi penerimaan PPh Badan KPP Surakarta periode 2001-2004 dari data di atas, dapat dilihat pada tabel II.2 berikut ini.

Tabel II.2
Persentase Kenaikan (Penurunan)
Penerimaan PPh Badan KPP Surakarta
Periode 2001-2004

| Tahun Anggaran | Realisasi Penerimaan PPh Badan | Kenaikan (Penurunan) | Persentase (%) |
|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 2001 | 18.657.437.677 | - | - |
| 2002 | 13.784.198.297 | (4.873.275.380) | (26,12) |
| 2003 | 20.883.683.102 | 7.099.484.805 | 51,50 |
| 2004 | 46.592.923.720 | 25.709.240.618 | 123,11 |

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Surakarta, data diolah

Persentase kenaikan (penurunan) di atas dihitung dengan cara membagi jumlah kenaikan (penurunan) realisasi penerimaan PPh Badan tahun sedang berjalan dengan jumlah realisasi penerimaan PPh Badan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar.

Besarnya persentase kenaikan (penurunan) penerimaan PPh Badan tersebut belum dapat dijadikan dasar bahwa penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta tidak efektif. Namun, penulis dapat menghitung persentase efektifitas penerimaan tersebut berdasarkan tabel II.1 di atas, yaitu dengan membandingkan antara hasil aktual dengan tujuan yang direncanakan dan standar (Gitosudarmo dan Mulyono, 1996). Dengan demikian, persentase efektivitas dihitung dengan membagi realisasi penerimaan PPh Badan dengan rencana penerimaan PPh Badan dikalikan 100%. Suatu tujuan dikatakan

efektif jika persentase efektivitas sama dengan atau lebih dari 100%, dan begitu pula sebaliknya.

Persentase efektivitas realisasi penerimaan PPh badan terhadap rencana penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta periode 2001–2004 dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3
Laporan Efektivitas Realisasi Penerimaan PPh Badan
terhadap Rencana Penerimaan PPh Badan KPP Surakarta
Periode 2001– 2004

| Tahun Anggaran | Realisasi Penerimaan PPh Badan (a) | Rencana Penerimaan PPh Badan (b) | Persentase Efektivitas (a : b) x 100% |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 2001 | 18.657.473.677 | 22.361.000.000 | 83,43 |
| 2002 | 13.784.198.297 | 25.766.980.000 | 53,50 |
| 2003 | 20.883.683.102 | 20.394.400.000 | 102,40 |
| 2004 | 46.592.923.720 | 29.290.000.000 | 159,07 |

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Surakarta, data diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta setiap tahunnya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini terbukti dari besarnya persentase efektivitas yang melebihi 100%, yaitu untuk tahun 2003 persentase efektivitas sebesar 102,40%, tahun 2004 persentase efektivitas sebesar 159,07% meskipun pada tahun 2001 dan 2002 persentase efektivitas di bawah 100% yaitu sebesar 83,44% dan 53,50%. Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2004 sangat efektif dengan persentase efektivitas tertinggi selama periode 2001–2004 yaitu sebesar 159,07%.

Jika dirata-rata persentase efektivitas penerimaan PPh Badan selama periode 2000–2004 lebih dari 100%, maka rata-rata penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta dapat dikatakan efektif. Persentase efektivitas rata-rata

penerimaan PPh Badan KPP Surakarta periode 2000–2004 tersebut dapat diperoleh melalui perhitungan berikut ini.

$$\begin{aligned}\text{Persentase Efektivitas} &= \frac{\text{Total Realisasi Penerimaan PPh Badan}}{\text{Total Rencana Penerimaan PPh Badan}} \times 100\% \\ &= \frac{99.918.278.796}{97.812.380.000} \times 100\% \\ &= 102,15\%\end{aligned}$$

Rata-rata persentase efektivitas penerimaan PPh Badan selama periode 2001–2004 di KPP Surakarta ternyata diketahui lebih dari 100%, yaitu sebesar 102,15%. Dengan demikian, penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta periode 2001–2004 dapat dikatakan efektif.

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh KPP Surakarta

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk merealisasikan target atau rencana penerimaan PPh Badan, pihak KPP Surakarta menemukan beberapa kendala baik yang bersifat intern maupun ekstern.

a. Kendala Intern

1) Wajib Pajak

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya di sini Wajib Pajak PPh Badan. Hal ini disebabkan karena faktor tingkat pendidikan dan pengetahuan Wajib Pajak yang relatif rendah, sehingga kurang memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Wajib Pajak enggan untuk meminta penjelasan atau penyuluhan mengenai hal-hal yang belum diketahui berkaitan dengan

pemenuhan segala kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kantor pajak, Wajib Pajak akan merasa dirugikan baik secara material maupun imaterial.

2) Fiskus

- Kurangnya jumlah tenaga SDM yang mempunyai keahlian yang standar, sehingga tingkat pengawasan yang dilakukan KPP Surakarta masih terbatas sekali, karena jumlah antara fiskus dengan Wajib Pajak yang diawasi tidak seimbang.
- Sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas, sehingga Fiskus dalam mengakses data yang diperlukan guna pengawasan pun menjadi terbatas.
- Program Aplikasi SIP (Sistem Informasi Perpajakan) masih terdapat kekurangan dan kelemahan atas kevalidan output datanya, sehingga seringkali Fiskus mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Fiskus masih sering melakukan pekerjaan yang berulang-ulang *cross chek* antara data output SIP dengan fisik dokumen yang bersangkutan.

b. Kendala Ekstern

Kendala ekstern yang dihadapi KPP Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Badan adalah kondisi politik dan ekonomi regional maupun nasional yang belum stabil. Hal ini dapat ditunjukkan

seperti nilai tukar rupiah (selisih kurs) yang cenderung semakin melemah, sehingga mengakibatkan harga barang dan jasa yang merupakan bahan baku produksi ikut naik yang pada akhirnya beban produksi makin membesar dan laba usaha yang diperoleh pun semakin kecil.

4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Fiskus Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak

- Mengintensifkan kegiatan penyuluhan melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
- Melakukan pendekatan persuasif bagi Wajib Pajak yang kurang peduli terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- Melakukan sosialisasi setiap kali ada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru, sehingga diharapkan ketentuan tersebut dapat segera dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh Wajib Pajak. Dengan demikian diharapkan sudah tidak ada lagi komplain dari Wajib Pajak di masa-masa mendatang karena ketidak tahuannya.
- Kepala KPP Surakarta selalu mengikutsertakan pegawainya dalam program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh kantor Pusat DJP guna memenuhi kebutuhan SDM yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Setiap sebulan sekali KPP Surakarta mengadakan *in-house training* guna membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas rutin.

- Terhadap program Aplikasi SIP yang masih belum sempurna, KPP Surakarta sering meminta bantuan dan memberikan masukan kepada Programmer di Kantor Pusat DJP untuk membenahinya sesuai dengan kebutuhan KPP.

5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Fiskus Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Badan

- Melakukan pengawasan terhadap 100 Wajib Pajak Besar Badan dan memberikan himbauan kepada Wajib Pajak lainnya.
- Memberikan sanksi administrasi (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Segera menyelesaikan pemeriksaan yang dilakukan, sehingga diharapkan dari hasil temuan pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan pembayaran PPh Badan.
- Mencermati Wajib Pajak yang *trend* omzet usahanya mengalami penurunan setiap tahun atau rugi terus menerus.
- Melakukan *Chross check* antara data SPT Tahunan PPh Badan dengan elemen data pada SIP, misal bukti potong/bukti pungut, data alat keterangan, dan data prioritas.
- Melakukan equalisasi peredaran usaha antara PPh Badan dan PPN serta membandingkan tingkat keuntungannya dari usaha Wajib Pajak Badan yang sejenis.

- Pengelompokan Wajib Pajak berdasarkan sektor usaha, melalui pengelompokan ini akan diawasi secara lebih intensif Wajib Pajak Badan dalam 5 sektor dominan.

BAB III

TEMUAN

A. Kelebihan

1. Realisasi penerimaan PPh Badan selama periode 2001-2004 yang tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp46.592.923.720,00. Hal ini disebabkan adanya tambahan setoran PPh Pasal 25 Badan dari KPP lain sebesar Rp17,9 milyar dan terdapat pelunasan tunggakan utang pajak dari Wajib Pajak sebesar ± Rp4 milyar.
2. Realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta dari tahun anggaran 2001–2004 mampu melampaui rencana yang telah ditetapkan. Dengan presentase efektivitas penerimaan PPh Badan periode 2001–2004 rata-rata di atas 100%, yaitu sebesar 102,15%. Dengan demikian penerimaan PPh Badan selama periode 2001–2004 dapat dikatakan efektif.
3. Langkah-langkah yang diambil KPP Surakarta dalam mengatasi segala kendala yang ada dan upaya meningkatkan penerimaan PPh Badan sudah cukup baik, hal ini terbukti dengan kenaikan realisasi Penerimaan PPh Badan sebesar 51,50% pada tahun 2003 dan 123,10% pada tahun 2004.
4. Adanya upaya-upaya dari pihak KPP dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan, sudah mulai menitikberatkan pada pelaksanaan pemeriksaan yaitu kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

B. Kekurangan

1. Realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2002 bila dibandingkan dengan tahun 2001 terjadi penurunan, yaitu sebesar Rp4.873.275.380,00 atau 26,11% dari penerimaan tahun 2001. Hal ini terjadi karena adanya restitusi PPh Badan hingga mencapai Rp4.554.482.409,00. Penurunan tersebut adalah penurunan penerimaan PPh Badan terendah selama periode 2001-2004, sehingga persentase efektivitas penerimaan PPh Badan tahun 2002 pun merupakan yang terendah, yaitu sebesar 53,50%.
2. Dalam upaya menegakkan *law enforcement* yaitu penerapan sanksi administrasi melalui penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) mengalami keterlambatan karena adanya perbaikan dan pembenahan Aplikasi SIP (Sistem Informasi Perpajakan).
3. Masih banyak tunggakan SPPP (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak) yang belum diselesaikan, dikarenakan jumlah pegawai kurang memadai atau tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak yang akan diperiksa.
4. Kurangnya personil untuk memeriksa pajak atau melakukan audit, sehingga menghambat efektifitas kerja dalam pemeriksaan dan audit itu sendiri.
5. Kurangnya sosialisasi tentang tata cara dan aturan dalam perpajakan sehingga banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, seperti WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tidak lengkap lampirannya dan tidak benar pengisiannya, sehingga menghambat perekaman data masuk SPT.

BAB IV

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa realiasi penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta sudah mampu melampaui rencana yang telah ditetapkan. Kecuali tahun 2002, yang disebabkan adanya restitusi pajak. Meskipun demikian rata-rata persentase penerimaan PPh Badan selama periode 2001–2004 cukup efektif dengan rata-rata persentase lebih dari 100 % yaitu sebesar 102,15%.

Dengan melihat hasil penelitian dapat dikatakan bahwa fiskus khususnya seksi PPh Badan berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta umumnya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal, seperti penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT, sehingga kadang-kadang menyebabkan tingkat realisasi penerimaan tidak sesuai dengan rencana penerimaan.

Kesimpulan di atas menyatakan bahwa penerimaan PPh Badan di KPP Surakarta sudah efektif. Namun masih perlu adanya optimalisasi peningkatan agar penerimaannya lebih efektif.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisis data, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu diteliti kembali apakah terjadinya restitusi PPh Badan tersebut dikarenakan pelunasan ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang atau karena Wajib Pajak mengalami kerugian, sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan. Dengan demikian, diharapkan adanya restitusi PPh Badan tidak akan banyak berpengaruh terhadap realisasi penerimaannya.
2. Perbaikan dan pembenahan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan sebaiknya bisa dikerjakan tanpa harus menghambat kerja. Misalnya dilakukan di luar jam kerja, dan penyempurnaan program SIP tersebut sedini mungkin dapat diantisipasi dengan SDM yang profesional.
3. Tunggakan SPPP sebaiknya segera ditindaklanjuti dan diselesaikan, misalnya dengan menyamakan persepsi antara Wajib Pajak dan Petugas Pemeriksa sepanjang masih dalam koridor hukum yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga kegiatan pemeriksaan bisa dilakukan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran yaitu guna menguji kepatuhan Wajib Pajak.
4. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitasnya masing-masing, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan selalu diintensifkan, sehingga Wajib Pajak menjadi lebih paham dan tahu.

Diharapkan pula, dengan pendekatan persuasif tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang pada akhirnya akan berpengaruh secara langsung dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan PPh Badan.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2003. “*Perpajakan*”. Andi. Yogyakarta.

Suandy, Early. 2002. “*Hukum Pajak*”. Salemba Empat. Yogyakarta.

Waluyo. 2003. “*Perpajakan Indonesia*”. Salemba Empat. Yogyakarta.

Republik Indonesia. “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*”.

Republik Indonesia. “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*”.

_____. Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan kedua undang-undang perpajakan tersebut.

SURAT PERNYATAAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURAKARTA

Jalan C.M. Agas No. 1
Surakarta
57141

Telpon : 717822, 728438
Faksimili : 728443
Website : <http://www.pajak.go.id>

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET- ²³ /WPJ.23/KP.0801/2005

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Nama : | Wahyu Harjanti |
| N.I.M : | 13402258 |
| Program Studi : | Perpajakan |
| Mahasiswa dari : | Universitas Sebelas Maret Surakarta |

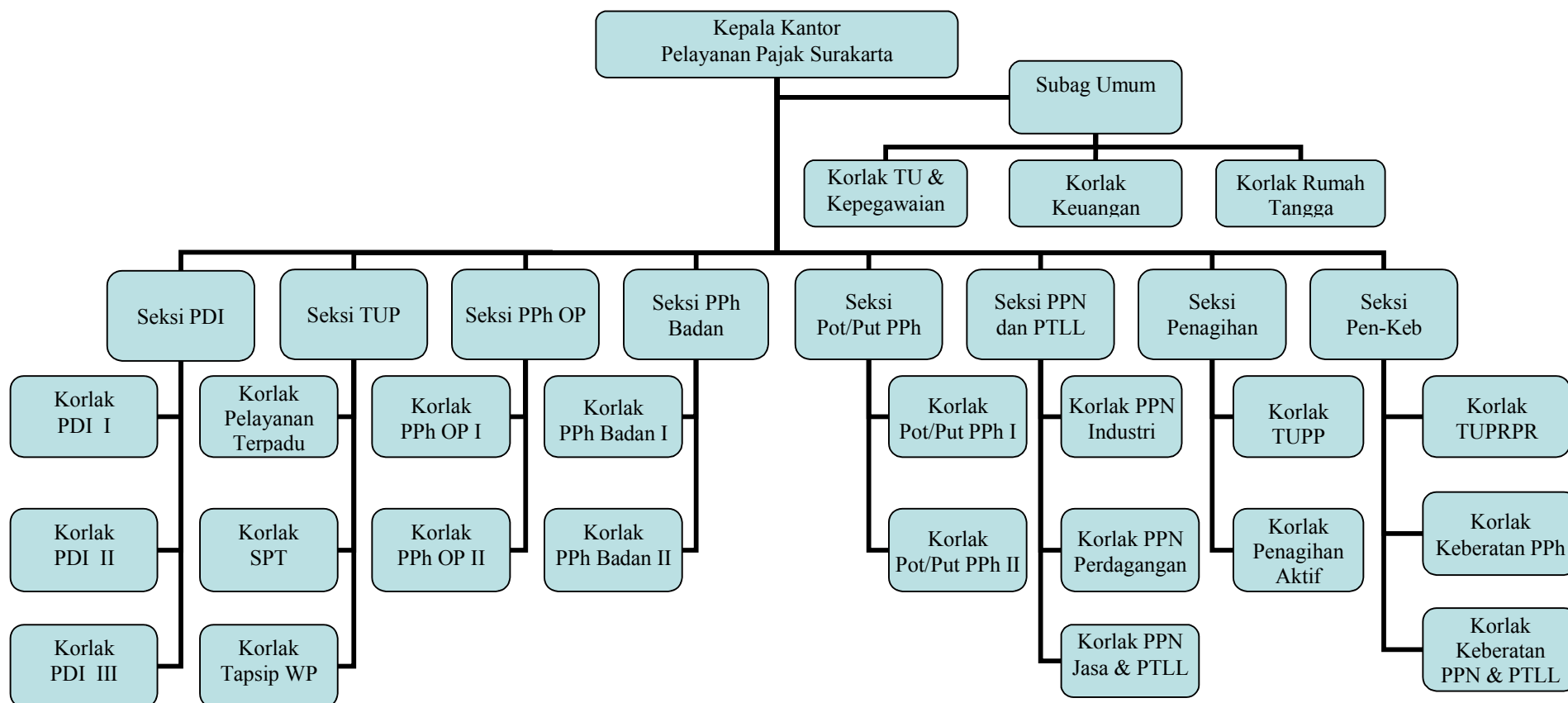
telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Surakarta mulai tanggal 01 April 2005 sampai dengan 14 April 2005.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 24 April 2005
Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Umum

Sri Hartono
NIP.050086302

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK SURAKARTA



KANTOR WILAYAH VIII
Revisi Rencana Penerimaan Pajak KPP Surakarta
Tahun Anggaran 2001
(dalam jutaan rupiah)

| Jenis Pajak | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | Sept | Okt | Nov | Das | Jumlah |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Pajak Penghasilan | | | | | | | | | | | | | |
| Pajak Penghasilan Non Migas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 PPh Pasal 21 | 4.699 | 5.703 | 6.469 | 4.701 | 5.207 | 5.140 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.188 | 6.188,4 | 71.043,4 |
| 1.2 PPh Pasal 22 | 152 | 192 | 181 | 237 | 251 | 328 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 2.811 |
| 1.3 PPh Pasal 22 Impor | 101 | 341 | 145 | 122 | 599 | 225 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 3.207 |
| 1.4 PPh Pasal 23 | 256 | 233 | 475 | 246 | 575 | 528 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 4.851 |
| 1.5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi | 764 | 587 | 1.012 | 384 | 353 | 339 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 7.151 |
| 1.6 PPh Pasal 25/29 Badan | 991 | 1.243 | 3.282 | 1.340 | 2.810 | 1.003 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | 22.361 |
| 1.7 PPh Pasal 26 | - | 92 | 28 | 45 | - | 44 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 431 |
| 1.8 PPh Final dan Fiskal LN | 8.500 | 6.281 | 9.199 | 10.712 | 10.790 | 11.718 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 124.006 |
| 1.9 PPh Non Migas Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Penghasilan Migas | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 PPh Minyak Bumi | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 2.2 PPh Gas Alam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 PPh Lainnya dari Minyak Bumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 PPh Lainnya dari Gas Alam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah A | 15.438 | 16.679 | 22.801 | 17.767 | 20.685 | 19.325 | 20.541 | 20.541 | 20.541 | 20.541 | 20.542 | 20.542,4 | 235.868,4 |
| PPN dan PPnBM | | | | | | | | | | | | | |
| 1. PPN Dalam Negeri | 11.441 | 9.558 | 8.579 | 13.055 | 17.069 | 11.171 | 14.221 | 14.221 | 14.221 | 14.221 | 14.222 | 14.222,6 | 156.201,6 |
| 2. PPN Impor | 304 | 190 | 337 | 485 | 1.555 | 2.297 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 11.390 |
| 3. PPnBM Dalam Negeri | 523 | 852 | 401 | 259 | 352 | 438 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 6.365 |
| 4. PPnBM Impor | 11 | - | 974 | 44 | 26 | 33 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 2.396 |
| 5. PPN & PPnBM Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah B | 12.279 | 10.600 | 10.351 | 13.843 | 19.002 | 13.939 | 16.056 | 16.056 | 16.056 | 16.056 | 16.057 | 16.057,6 | 176.352,6 |
| Pajak Lainnya dan PIB | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Bea Matra | 1.503 | 1.357 | 1.460 | 1.390 | 1.555 | 1.716 | 1.077 | 1.077 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 15.437 |
| 2. Pajak Tidak Langsung Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Bunga Perangihan PPh | 40 | - | 1 | - | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 84 |
| 4. Bunga Perangihan PPN dan PTIL | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 5. BPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Pemberian Imbalan Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah C | 1.543 | 1.357 | 1.461 | 1.390 | 1.561 | 1.722 | 1.084 | 1.084 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 15.537 |
| Jumlah (A+B+C) | 29.285 | 28.636 | 34.603 | 33.000 | 41.153 | 34.986 | 37.691 | 37.691 | 37.692 | 37.692 | 37.694 | 37.695 | 427.758 |

KANWIL X DJP JAWA TENGAH DAN DIY
RENCANA PENERIMAAN PAJAK KPP SURABAYA

APBN-P Tahun Anggaran 2022

(Dalam Jutaan Rupiah)

| NO | JENIS PAJAK | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | JUMLAH |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A | Pajak Penghasilan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pajak Penghasilan Non Migas | 29,954.59 | 29,954.59 | 29,960.40 | 29,343.83 | 29,346.62 | 29,350.49 | 29,343.83 | 29,346.62 | 29,348.83 | 29,346.50 | 29,349.30 | 29,359.75 | 351,005.36 |
| | 1.1. PPh Pasal 21 | 994.09 | 994.09 | 994.21 | 972.66 | 972.66 | 972.66 | 972.66 | 972.66 | 972.66 | 972.66 | 972.78 | 972.79 | 11,736.56 |
| | 1.2. PPh Pasal 22 | 1,149.30 | 1,149.30 | 1,151.63 | 1,144.98 | 1,144.98 | 1,146.64 | 1,144.98 | 1,144.98 | 1,144.98 | 1,144.98 | 1,146.64 | 1,149.08 | 13,760.46 |
| | 1.3. PPh Pasal 22 Impor | 1,173.41 | 1,173.41 | 1,174.75 | 1,149.19 | 1,149.19 | 1,149.19 | 1,149.19 | 1,149.19 | 1,149.19 | 1,149.19 | 1,149.19 | 1,151.33 | 13,866.44 |
| | 1.4. PPh Pasal 23 | 1,440.83 | 1,440.83 | 1,440.83 | 1,409.07 | 1,410.75 | 1,410.75 | 1,409.07 | 1,410.75 | 1,410.75 | 1,410.75 | 1,410.75 | 1,413.95 | 17,019.07 |
| | 1.5. PPh Pasal 25/29 CP | 82.46 | 82.46 | 82.58 | 80.72 | 80.84 | 80.84 | 80.72 | 80.84 | 80.84 | 80.72 | 80.84 | 80.92 | 974.77 |
| | 1.6. PPh Pasal 25/29 Badan | 2,181.06 | 2,181.06 | 2,181.38 | 2,135.38 | 2,135.38 | 2,136.28 | 2,135.38 | 2,135.38 | 2,136.28 | 2,135.38 | 2,136.28 | 2,137.15 | 25,766.98 |
| | 1.7. PPh Pasal 26 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 3,496.20 |
| | 1.8. PPh Pasal dan Fiskal LN | 22,638.43 | 22,638.43 | 22,636.43 | 22,162.83 | 22,162.83 | 22,164.14 | 22,162.83 | 22,162.83 | 22,164.14 | 22,162.83 | 22,162.83 | 22,164.31 | 267,384.88 |
| | 1.9. PPh Non Migas Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Pajak Penghasilan Migas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1. PPh Migas Bumi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2. PPh Gas Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3. PPh Lainnya dari Minyak Bumi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4. PPh Lainnya dari Gas Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah A | 29,954.59 | 29,954.59 | 29,960.40 | 29,343.83 | 29,346.62 | 29,350.49 | 29,343.83 | 29,346.62 | 29,348.83 | 29,346.50 | 29,349.30 | 29,359.75 | 351,005.36 |
| B | PPN dan PPNBM | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. PPN Dalam Negeri | 13,791.60 | 13,796.60 | 13,793.31 | 13,507.08 | 13,507.94 | 13,507.94 | 13,507.08 | 13,507.94 | 13,507.94 | 13,507.68 | 13,507.94 | 13,508.51 | 162,960.92 |
| | 2. PPN Impor | 2,290.76 | 2,290.75 | 2,290.76 | 2,242.65 | 2,242.65 | 2,242.65 | 2,242.65 | 2,242.65 | 2,242.65 | 2,242.65 | 2,242.65 | 2,244.08 | 27,057.58 |
| | 3. PPNBM Dalam Negeri | 264.86 | 264.86 | 264.86 | 258.97 | 259.46 | 259.46 | 258.97 | 259.46 | 259.46 | 259.46 | 259.46 | 260.19 | 3,129.47 |
| | 4. PPNBM Ekspor | 141.89 | 141.89 | 141.89 | 138.43 | 139.01 | 139.01 | 138.43 | 139.01 | 139.01 | 139.01 | 139.01 | 139.59 | 1,676.19 |
| | 5. PPN & PPNBM Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah B | 16,494.12 | 16,494.12 | 16,495.83 | 16,147.13 | 16,149.06 | 16,149.06 | 16,147.13 | 16,149.06 | 16,149.06 | 16,148.20 | 16,149.06 | 16,152.17 | 194,824.16 |
| C | Pajak Lainnya dan PIB | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Bea Meterai | 894.20 | 894.20 | 895.55 | 875.37 | 876.04 | 876.04 | 875.37 | 876.04 | 876.04 | 876.04 | 876.04 | 876.96 | 10,667.88 |
| | 2. Pajak Tidak Langsung Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Bunga Pemogihan PPh | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.54 | 3.05 | 3.05 | 2.54 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.84 | 36.40 |
| | 4. Bunga Pemogihan PPh dan PPh | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.53 | 0.79 | 0.79 | 0.53 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1.26 | 9.42 |
| | 5. SPP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6. Pemberton Insentif bunga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah C | 898.05 | 898.15 | 899.39 | 878.44 | 879.88 | 879.88 | 878.44 | 879.88 | 879.88 | 879.88 | 879.88 | 882.06 | 10,613.30 |
| Jumlah (A+B+C) | | 47,346.76 | 47,346.76 | 47,355.62 | 46,249.00 | 46,375.56 | 46,379.61 | 46,349.40 | 46,376.56 | 46,377.77 | 46,374.59 | 46,378.24 | 46,394.17 | 566,443.25 |

[illegible]

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURAKARTA
RENCANA PENERIMAAN PAJAK
SESUAI APBN TAHUN ANGGARAN 2004
(dalam jutaan rupiah)

| JENIS PAJAK | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | JUMLAH |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PAJAK PENGHASILAN | | | | | | | | | | | | | |
| Pajak Penghasilan Non Migas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PPh Pasal 21 | 7.503,60 | 7.503,60 | 12.067,10 | 7.503,60 | 7.503,60 | 7.503,60 | 7.503,60 | 7.503,60 | 7.503,60 | 7.503,60 | 7.503,60 | 12.067,42 | 99.170,52 |
| 2 PPh Pasal 22 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 864,90 | 865,17 | 10.379,07 |
| 3 PPh Pasal 22 Impor | 765,05 | 765,05 | 765,05 | 765,05 | 765,05 | 765,05 | 765,05 | 765,05 | 765,05 | 765,05 | 765,05 | 765,31 | 9.180,88 |
| 4 PPh Pasal 23 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,22 | 1.372,27 | 16.456,69 |
| 5 PPh Pasal 25/29 CP | 875,76 | 1.020,75 | 2.596,04 | 873,76 | 864,24 | 592,76 | 763,75 | 646,44 | 610,76 | 936,65 | 714,58 | 967,45 | 10.976,96 |
| 6 PPh Pasal 25/29 Badan | 1.345,00 | 1.873,00 | 5.911,20 | 1.504,00 | 1.732,00 | 1.934,00 | 2.201,00 | 1.609,00 | 1.948,00 | 1.329,00 | 2.932,00 | 4.622,00 | 29.290,00 |
| 7 PPh Pasal 26 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | 68,10 | 816,98 |
| 8 PPh Final dan Fiskal LN | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,04 | 18.097,12 | 193.164,56 |
| 9 PPh Non Migas Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Penghasilan Migas | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PPh Migas Bumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 PPh Gas Alam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 PPh Lainnya dari Minyak Bumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 PPh Lainnya dari Gas Alam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| jumlah A | 28.991,65 | 29.564,64 | 39.741,43 | 29.048,65 | 29.107,13 | 29.197,65 | 29.555,64 | 29.925,33 | 29.234,67 | 28.936,54 | 30.317,47 | 36.824,84 | 369.445,64 |
| PN dan PPnBM | | | | | | | | | | | | | |
| PPN Dalam Negeri | 20.667,13 | 26.464,00 | 22.175,35 | 22.431,39 | 22.431,39 | 22.431,39 | 23.531,55 | 23.984,33 | 27.724,18 | 30.244,57 | 26.463,69 | 28.692,36 | 302.445,68 |
| PPN Impor | 9.912,37 | 12.564,63 | 10.530,35 | 10.650,01 | 10.650,01 | 10.650,01 | 11.172,35 | 13.761,25 | 13.182,94 | 14.359,57 | 12.564,63 | 13.717,57 | 143.555,69 |
| PPnBM Dalam Negeri | 73,36 | 93,94 | 78,73 | 79,63 | 79,63 | 79,63 | 83,53 | 102,89 | 96,41 | 107,35 | 93,94 | 102,58 | 1.073,61 |
| PPnBM Impor | 15,28 | 19,57 | 15,40 | 16,59 | 16,59 | 16,59 | 17,40 | 21,43 | 20,51 | 22,36 | 19,57 | 21,36 | 223,65 |
| PPN dan PPnBM Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| jumlah B | 30.568,14 | 39.142,14 | 32.804,83 | 33.177,62 | 33.177,62 | 33.177,62 | 34.804,83 | 42.869,95 | 41.006,04 | 44.733,85 | 39.142,13 | 42.733,85 | 447.336,63 |
| Pajak Lainnya dan PIB | | | | | | | | | | | | | |
| Bea Meterai | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 1.362,91 | 16.354,92 |
| Pajak Tidak Langsung Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bunga Penagihan PPh | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 24,45 |
| Bunga Penagihan PPh dan PTLL | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 16,79 |
| BPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembayaran imbalan Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| jumlah C | 1.364,34 | 1.364,33 | 1.364,34 | 1.364,35 | 1.364,35 | 1.364,35 | 1.364,35 | 1.364,35 | 1.364,35 | 1.364,35 | 1.364,35 | 1.364,35 | 16.396,16 |
| jumlah (A+B+C) | 60.825,13 | 70.073,11 | 73.912,60 | 63.592,62 | 63.651,10 | 63.741,62 | 65.826,82 | 73.161,63 | 71.607,06 | 75.036,75 | 70.825,95 | 80.925,04 | 833.189,43 |

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURAKARTA
RENCANA PENERIMAAN PAJAK
APBN TAHUN ANGGARAN 2005
(dalam jutaan rupiah)

| JENIS PAJAK | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Pajak Penghasilan Non Migas | 21.611,79 | 20.540,27 | 39.248,31 | 21.840,53 | 24.092,39 | 27.456,13 | 30.389,71 | 26.938,45 | 27.215,30 | 26.875,61 | 36.317,08 | 37.982,43 | 340.507,99 |
| 1.1 PPh Pasal 21 | 5.473,01 | 5.282,70 | 15.700,33 | 5.701,45 | 5.478,49 | 8.338,95 | 9.695,78 | 6.945,94 | 6.387,52 | 8.479,50 | 15.613,59 | 9.909,37 | 102.926,63 |
| 1.2 PPh Pasal 22 | 546,94 | 443,94 | 383,93 | 561,98 | 471,02 | 628,55 | 652,31 | 762,28 | 645,60 | 831,44 | 728,96 | 1.338,13 | 8.194,48 |
| 1.3 PPh Pasal 22 Impor | 27,22 | 88,94 | 560,53 | 352,94 | 108,32 | 748,52 | 404,69 | 110,30 | 303,97 | 965,01 | 396,96 | 1.021,88 | 5.085,28 |
| 1.4 PPh Pasal 23 | 1.430,35 | 900,39 | 1.154,52 | 1.350,03 | 948,16 | 1.776,51 | 1.596,39 | 1.769,75 | 1.156,39 | 1.358,39 | 1.619,75 | 2.462,17 | 18.042,80 |
| 1.5 PPh Pasal 25 / 29 OP | 416,52 | 504,46 | 1.736,01 | 569,62 | 568,98 | 601,38 | 530,90 | 576,77 | 550,09 | 521,14 | 524,78 | 645,13 | 7.845,77 |
| 1.6 PPh Pasal 25 / 29 Badan | 1.492,30 | 2.077,51 | 6.560,90 | 1.667,86 | 1.976,72 | 2.145,79 | 2.411,64 | 1.784,90 | 2.162,04 | 1.807,66 | 3.254,44 | 5.140,13 | 32.511,89 |
| 1.7 PPh Pasal 26 | 28,25 | 19,91 | 81,45 | 68,73 | 38,21 | 195,14 | 20,15 | 19,90 | 155,78 | 27,18 | 91,96 | 270,89 | 1.021,55 |
| 1.8 PPh Final dan FLN | 12.197,50 | 11.122,42 | 12.830,64 | 11.367,92 | 14.502,49 | 12.997,29 | 15.047,85 | 14.968,61 | 15.954,51 | 12.705,29 | 14.085,64 | 17.194,73 | 164.875,59 |
| 1.9 PPh Non Migas Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Penghasilan Migas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 PPh Minyak Bumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 PPh Gas Alam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 PPh Lainnya dari Minyak Bumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 PPh Lainnya Gas Alam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah A | 21.611,79 | 20.540,27 | 39.248,31 | 21.840,53 | 24.092,39 | 27.456,13 | 30.389,71 | 26.938,45 | 27.215,30 | 26.875,61 | 36.317,08 | 37.982,43 | 340.507,99 |
| PPN Dalam Negeri | 15.333,50 | 19.643,94 | 16.456,01 | 16.658,06 | 16.658,06 | 16.658,06 | 17.466,27 | 21.507,30 | 20.586,85 | 22.450,21 | 19.643,94 | 21.439,95 | 224.502,15 |
| PPN Impor | 5.349,63 | 6.853,48 | 5.741,26 | 5.811,75 | 5.811,75 | 5.811,75 | 6.093,73 | 7.503,59 | 7.182,45 | 7.832,55 | 6.853,48 | 7.480,09 | 78.325,51 |
| PPN BM Dalam Negeri | 63,80 | 81,74 | 68,47 | 69,31 | 69,31 | 69,31 | 72,67 | 89,49 | 85,66 | 93,41 | 81,74 | 89,21 | 934,12 |
| PPNBM Impor | 26,38 | 33,80 | 28,31 | 28,66 | 28,66 | 28,66 | 30,05 | 37,00 | 35,42 | 38,63 | 33,81 | 36,89 | 386,27 |
| PPN / PPNBM Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah B | 20.773,31 | 26.612,96 | 22.294,05 | 22.567,78 | 22.567,78 | 22.567,78 | 23.662,72 | 29.137,38 | 27.890,38 | 30.414,80 | 26.612,97 | 29.046,14 | 304.148,05 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.076,72 | 2.086,69 | 24.930,61 |
| Pajak Tidak Langsung Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bunga Penagihan PPh | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,56 | 66,08 |
| Bunga Penagihan PPN & PTL | 5,35 | 5,31 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,39 | 64,20 |
| BPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemberian Imbalan Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah C | 2.087,55 | 2.087,51 | 2.087,55 | 2.087,57 | 2.087,57 | 2.087,57 | 2.087,57 | 2.087,57 | 2.087,57 | 2.087,57 | 2.087,57 | 2.097,64 | 25.060,91 |
| Jumlah (B + C) | 22.860,86 | 28.700,47 | 24.381,60 | 24.655,35 | 24.655,35 | 24.655,35 | 25.750,29 | 31.224,95 | 29.977,95 | 32.502,37 | 28.700,54 | 31.143,78 | 329.208,86 |
| Jumlah (A + B + C) | 44.472,65 | 49.240,74 | 63.629,91 | 46.495,88 | 48.747,74 | 52.111,48 | 56.140,00 | 58.163,40 | 57.193,25 | 59.377,98 | 65.017,62 | 69.125,21 | 669.716,85 |

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA /Kode : 526

SURABAYA, 11-Apr-2002

Nomor : LAP- /KPS.10/EP.1709/2001

Kepada Yth.
SIPALA KANTOR-X DIP JATENG DAN DIY
di SURABAYA

| INDUK | | LAPORAN PERENCANAAN PAJAK (LPP) | | | | Halaman 1 dari 2 | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Bulan Juli | | | | SIP Bulan Juli | | | |
| No. | Jenis Pajak | L P S | | DAFTAR P VI | | L P S | | DAFTAR P VI | |
| | | Lebar | Rp. | Lebar | Rp. | Lebar | Rp. | Lebar | Rp. |
| A. Pajak Penghasilan | | | | | | | | | |
| 1. | PPH ROR NISAS | 12,445 | 31,320,266,867 | 13,596 | 34,921,830,053 | 123,269 | 258,415,119,853 | 120,997 | 262,235,623,103 |
| 1.1 | PPH Pasal 21 | 3,197 | 12,232,979,947 | 3,485 | 14,779,285,261 | 27,170 | 85,482,212,598 | 29,728 | 89,372,247,932 |
| 1.2 | PPH Pasal 22 | 4,197 | 846,322,759 | 4,577 | 954,500,793 | 37,453 | 4,622,269,683 | 35,622 | 4,259,746,115 |
| 1.3 | PPH Pasal 22 Import | 38 | 83,153,992 | 266 | 1,037,571,791 | 1,476 | 2,711,588,472 | 1,210 | 5,401,412,456 |
| 1.4 | PPH Pasal 23 | 576 | 1,604,405,644 | 681 | 1,819,784,236 | 3,471 | 8,825,525,235 | 3,370 | 6,330,760,536 |
| 1.5 | PPH Pasal 25/29 UP | 2,482 | 462,005,195 | 2,493 | 458,040,041 | 26,412 | 5,778,812,475 | 26,392 | 5,765,582,666 |
| 1.6 | PPH Pasal 25/29 Badan | 881 | 2,239,589,140 | 868 | 2,146,528,487 | 10,937 | 20,307,578,864 | 10,875 | 18,652,471,477 |
| 1.7 | PPH Pasal 26 | 3 | 26,727,429 | 5 | 26,306,937 | 25 | 555,110,589 | 22 | 313,855,180 |
| 1.8 | PPH Pasal dan Fik | 1,031 | 13,804,857,561 | 1,121 | 14,095,315,652 | 6,662 | 132,542,558,870 | 6,770 | 131,545,064,421 |
| 1.9 | PPH ROR Nipas lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49,684,749 | 0 | 0 |
| 2. | PPH ROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,891,029 | 1 | 7,754,138 |
| 2.1 | PPH Minyak Bumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,891,029 | 1 | 7,754,138 |
| 2.2 | PPH Gas Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | PPH Lain Minyak Bumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | PPH lainnya Gas Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah A | | 12,445 | 31,320,266,867 | 13,596 | 34,921,830,053 | 123,271 | 258,426,010,887 | 120,998 | 262,242,878,171 |
| B. PPh dan PPhBn | | | | | | | | | |
| 1. | PPH Dalam Negeri | 4,496 | 22,747,151,381 | 5,353 | 25,240,704,976 | 33,048 | 160,967,956,823 | 32,767 | 145,804,020,305 |
| 2. | PPH Import | 41 | 80,463,802 | 341 | 4,345,194,445 | 675 | 4,428,226,121 | 1,399 | 24,892,931,519 |
| 3. | PPHBM Dalam Negeri | 3 | 345,891,073 | 6 | 302,661,666 | 48 | 4,644,365,104 | 44 | 4,295,633,320 |
| 4. | PPHBM Import | 9 | 62,196,651 | 14 | 83,114,923 | 78 | 557,261,141 | 105 | 1,891,450,582 |
| 5. | PPH/PPHBM lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah B | | 4,551 | 22,732,904,907 | 5,714 | 32,171,678,010 | 33,849 | 170,595,642,851 | 34,515 | 176,884,055,644 |
| C. PENGUPATAN ATAS PAJAK LAINNYA & PIB | | | | | | | | | |
| 1. | Ban Meterai | 97 | 1,356,661,000 | 97 | 1,356,661,000 | 1,333 | 18,784,614,000 | 1,319 | 18,669,464,000 |
| 2. | PTLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Denda Penagihan PPh | 0 | 5,008,993 | 0 | 2,400,993 | 52 | 47,930,334 | 52 | 77,244,035 |
| 4. | Denda Penag.PPh & PILL | 3 | 359,983 | 6 | 42,661,000 | 43 | 38,884,259 | 53 | 86,448,994 |
| 5. | RPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | PIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -305,671,798 |
| Jumlah C | | 100 | 1,369,429,976 | 111 | 1,402,731,001 | 1,429 | 18,867,428,633 | 1,419 | 18,527,487,231 |
| D. KURSI & KUTU (A+B+C) | | | | 15,421 | 68,454,239,064 | | | 156,932 | 457,654,420,996 |

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA /Kode : 576

SURABAYA, 16 Apr 2003

Memor : LAP- /WPJ.XX/SP.XXXX/2003

Kepada Yth.
Kepala Kantor Y TPT JATE-C DAN DIT
DI SURABAYA

LAPORAN PERPAJIAN PAJAK (LPP)
Bulan : APRIL 2003 Tahun : 2003

Belanja : 1-04-001

| No. | | Jenis Pajak | | Bulan ini | | S/D Bulan ini | | | |
|--|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | L P 3 | | DAFTAR P VI | | L P 3 | | DAFTAR P VI | |
| | | Lebar | Rp. | Lebar | Rp. | Lebar | Rp. | Lebar | Rp. |
| A. Pajak Penghasilan | | | | | | | | | |
| 1. PPh BUKU KECAS | | 12,674 | 25,830,595,899 | 13,948 | 30,079,313,975 | 130,008 | 270,357,437,150 | 127,025 | 272,209,211,255 |
| 1.1 PPh Pasal 21 | | 3,528 | 9,183,252,128 | 3,632 | 10,448,101,453 | 29,190 | 81,580,176,220 | 29,444 | 85,833,167,293 |
| 1.2 PPh Pasal 22 | | 4,051 | 1,005,505,178 | 4,766 | 1,747,158,518 | 39,425 | 4,768,804,381 | 34,341 | 4,304,823,500 |
| 1.3 PPh Pasal 23 Import | | 183 | 576,763,274 | 227 | 1,849,881,985 | 1,455 | 7,979,998,437 | 1,345 | 7,213,029,267 |
| 1.4 PPh Pasal 25 | | 334 | 1,007,879,705 | 320 | 1,113,009,983 | 4,831 | 10,374,702,925 | 4,857 | 9,976,467,821 |
| 1.5 PPh Pasal 26/29 OP | | 2,320 | 853,784,078 | 2,528 | 852,815,729 | 35,472 | 7,294,154,561 | 35,407 | 7,112,314,189 |
| 1.6 PPh Pasal 25/29 Badan | | 969 | 7,755,468,836 | 969 | 2,204,842,506 | 11,799 | 19,616,619,840 | 11,473 | 15,384,198,791 |
| 1.7 PPh Pasal 26 | | 5 | 34,304,316 | 5 | 27,852,468 | 42 | 776,711,898 | 35 | 669,639,184 |
| 1.8 PPh Final dan FLN | | 887 | 16,814,150,442 | 1,070 | 11,706,541,005 | 6,556 | 741,635,470,893 | 6,794 | 141,374,755,145 |
| 1.9 PPh Non Kikur lainnya | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. PPh BUKAS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 PPh Minyak Bumi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 PPh Gas Alam | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 PPh Lain Minyak Bumi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 PPh lainnya Gas Alam | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNJAN A | | 12,674 | 25,830,595,899 | 13,948 | 30,079,313,975 | 130,008 | 270,357,437,150 | 127,025 | 272,209,211,255 |
| B. PPh DAN PPhBN | | | | | | | | | |
| 1. PPh Bulan Megeri | | 4,316 | 71,985,454,804 | 5,707 | 21,716,443,433 | 34,847 | 190,585,659,476 | 35,022 | 149,775,148,875 |
| 2. PPh Import | | 142 | 551,468,699 | 217 | 6,488,958,487 | 1,849 | 6,409,906,736 | 1,496 | 27,858,392,151 |
| 3. PPhBN Bulan Megeri | | 4 | 81,070,433 | 4 | 81,070,433 | 52 | 2,424,649,389 | 46 | 1,798,427,714 |
| 4. PPhBN Import | | 2 | 15,285,002 | 1 | 18,860,313 | 171 | 1,472,319,557 | 180 | 1,513,248,400 |
| 5. PPh/PPBN Lainnya | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| JUNJAN B | | 4,464 | 22,433,117,438 | 5,471 | 27,805,337,561 | 36,119 | 200,893,535,150 | 36,743 | 180,545,716,540 |
| C. PENDAPATAN ATAS PAJAK LAIHNYA & PIS | | | | | | | | | |
| 1. Bea Materai | | 101 | 1,748,106,687 | 80 | 1,733,960,000 | 1,292 | 19,740,940,087 | 1,278 | 19,708,255,170 |
| 2. PTIL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Bunga Penjualan PPh | | 2 | 1,750,000 | 2 | 1,750,000 | 41 | 55,362,012 | 72 | 66,511,873 |
| 4. Bunga Penas PPh & PTIL | | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 20 | 13,895,430 | 10 | 13,783,058 |
| 5. PPh | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. PIS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -133,752,583 |
| JUNJAN C | | 104 | 1,750,056,687 | 83 | 1,757,910,000 | 1,384 | 19,810,197,549 | 1,377 | 19,726,755,678 |
| D. HUKUM & METO (A+B+C) | | | | | | | | | |
| | | | | 19,502 | 59,122,456,486 | | | 165,143 | 477,879,183,433 |

Nomor : LAP- /MPJ.XII/SP.XXXI/2001

Kepada Yth.
BUPATI KAWIL JAWA BAGIAN TENGAH II
di SEMARANG

INDUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
BULAN : DESEMBER TAHUN : 2001

Halaman 1 dari 2

| No. | Jenis Pajak | Bulan ini | | | | S/D Bulan ini | | | |
|--|------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | L P 3 | | DAFTAR P VI | | L P 3 | | DAFTAR P VI | |
| | | Lebar | Rp. | Lebar | Rp. | Lebar | Rp. | Lebar | Rp. |
| A. Pajak Penghasilan | | | | | | | | | |
| 1. | PPH MGN MIGAS | 16,739 | 28,820,856,904 | 19,564 | 36,060,755,539 | 139,412 | 255,740,171,273 | 138,356 | 264,395,109,827 |
| 1.1 | PPH Pasal 21 | 5,066 | 12,687,466,666 | 5,554 | 15,566,455,133 | 35,310 | 22,454,538,683 | 35,371 | 98,234,163,522 |
| 1.2 | PPH Pasal 22 | 5,431 | 1,829,660,853 | 6,917 | 2,094,835,514 | 41,256 | 8,700,919,586 | 39,104 | 7,688,008,362 |
| 1.3 | PPH Pasal 22 Iapor | 186 | 59,679,137 | 392 | 2,421,767,403 | 1,804 | 1,075,302,359 | 1,487 | 4,897,577,311 |
| 1.4 | PPH Pasal 23 | 1,078 | 1,230,724,817 | 1,421 | 1,904,240,749 | 5,845 | 11,485,486,257 | 6,251 | 11,825,588,011 |
| 1.5 | PPH Pasal 25/29 OF | 2,662 | 1,263,545,086 | 2,696 | 1,262,810,663 | 35,975 | 7,812,867,997 | 35,983 | 7,599,926,752 |
| 1.6 | PPH Pasal 25/29 Badan | 919 | 2,890,426,672 | 1,018 | 3,365,080,124 | 12,008 | 23,826,446,892 | 11,915 | 20,883,883,107 |
| 1.7 | PPH Pasal 26 | 8 | 96,856,348 | 10 | 152,114,329 | 45 | 697,387,419 | 42 | 614,197,978 |
| 1.8 | PPH Final dan FLK | 1,277 | 8,752,296,925 | 1,750 | 9,273,971,594 | 7,587 | 113,541,352,043 | 7,875 | 112,654,970,989 |
| 1.9 | PPH Non Migas lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,799,977 | 0 | 0 |
| 2. | PPH MIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,058,956 |
| 2.1 | PPH Minyak Bumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,058,956 |
| 2.2 | PPH Gas Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | PPH Lain Minyak Bumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | PPH Lainnya Gas Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNJAH A | | 16,739 | 28,820,856,904 | 19,564 | 36,060,755,539 | 139,412 | 255,740,171,273 | 138,357 | 264,398,168,783 |
| B. PPN DAN PPNBM | | | | | | | | | |
| 1. | PPH Dalam Negeri | 5,833 | 26,533,978,312 | 7,591 | 46,204,300,670 | 36,756 | 219,711,501,038 | 37,687 | 190,067,874,964 |
| 2. | PPH Iapor | 78 | 154,013,929 | 235 | 43,543,054,468 | 1,277 | 14,457,402,214 | 1,519 | 92,040,942,857 |
| 3. | PPNBM Dalam Negeri | 4 | 141,698,364 | 4 | 141,698,364 | 55 | 928,736,487 | 53 | 668,504,487 |
| 4. | PPNBM Iapor | 2 | 198,680 | 3 | 255,902 | 55 | 125,840,503 | 59 | 131,811,333 |
| 5. | PPN/PPNBM Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNJAH B | | 5,917 | 28,829,889,285 | 7,833 | 89,889,509,404 | 38,143 | 235,705,486,247 | 39,318 | 282,904,123,641 |
| C. PENDAPATAN ATAS PAJAK LAINNYA & PIS | | | | | | | | | |
| 1. | Bea Meterai | 111 | 1,966,944,000 | 117 | 2,106,301,963 | 1,270 | 21,649,476,810 | 1,285 | 21,895,888,963 |
| 2. | PTLL | 0 | 0 | 1 | 58,000 | 0 | 0 | 2 | 108,000 |
| 3. | Bunga Penagihan PPH | 3 | 3,929,050 | 3 | 3,929,050 | 55 | 26,811,500 | 57 | 24,450,421 |
| 4. | Bunga Pemog.PPH & PILL | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 13 | 2,335,621 | 14 | -6,986,145 |
| 5. | BPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | PIS | 0 | 0 | -2 | -12,730,774 | 0 | 0 | -18 | -371,411,342 |
| JUNJAH C | | 115 | 1,971,075,050 | 120 | 2,097,758,739 | 1,338 | 21,678,423,931 | 1,335 | 21,547,049,397 |
| D. MURMI & NETO (A+B+C) | | | | 27,517 | 128,047,823,182 | | | 178,990 | 568,844,352,321 |

REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA /Kode : 526

SURABAYA, 03-Apr-2005

Nomor : LAP-12 /WPJ.13/KP.0809/2005

Kepada Yth.
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TENGAH II
 di YOGYAKARTA

LAPORAN PENGISIAN PAJAK (LPP)
 BULAN : DESEMBER TAHUN : 2004

Revisi : 1 dari 1

| 1999A | | KAPITUL 1000 | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
|-------|--|--|--|--|--|